



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ANALISIS FUNGSI BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IV RIAU-KEPRI DI WILAYAH PEKANBARU DALAM PERMBERLAKUAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DI MASA PANDEMI COVID-19

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

KARINA KADIR

NIM. 11770523409

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2021

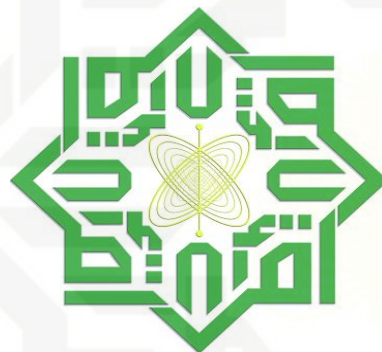


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANALISIS FUNGSI BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IV RIAU-KEPRI DI WILAYAH PEKANBARU DALAM PERMBERLAKUAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DI MASA PANDEMI COVID-19

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Comprehensive Strata I Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

KARINA KADIR

NIM. 11770523409

**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : KARINA KADIR
NIM : 11770523409
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI: ANALISIS FUNGSI BALAI PENGELOLA
TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IV RIAU-
KEPRI DI WILAYAH PEKANBARU DALAM
PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN SOSIAL
BERSKALA BESAR (PSBB) DI MASA PANDEMI
COVID-19

DISETUJUI OLEH
Dosen Pembimbing



Dr. Mustigowati Ummul Fithriyyah., M.Si

NIP. 197911127200801 2 010

Mengetahui

Dekan

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Mahvarni, S.E., M.M

NIP. 19700826 199903 2 001

Ketua Jurusan

Program Studi Administrasi Negara



Dr. Khairunsyah Purba., S.Sos., M.Si

NIP. 19781025 200604 100 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : KARINA KADIR
NIM : 11770523409
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS FUNGSI BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IV RIAU-KEPRI DI WILAYAH PEKANBARU DALAM PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DI MASA PANDEMI COVID-19
TANGGAL UJIAN: 17 NOVEMBER 2021

DISETUJUI OLEH

Ketua Penguji

Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si

NIP. 19640508 199303 2 002

MENGETAHUI

PENGUJI I

Afrizal, S.Sos, M.Si

NIP. 19690419 200701 1 025

PENGUJI II

Muslim, S.Sos, M.Si

NIP. 19820205 201503 1 002



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Karina Kadir
 NIM : 11770523409
 Tempat/Tgl. Lahir : Bukittinggi, 21 Juli 1999
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Prodi : S1 Ilmu Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Analisis Fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah IV Riau - Kepri Di Wilayah Pekanbaru Dalam Pember-
lakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
Di Masa Pandemi Covid-19.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 November
 ...buat pernyataan



Karina Kadir
 NIM : 11770523409

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANALISIS FUNGSI BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IV RIAU-KEPRI DI WILAYAH PEKANBARU DALAM PERMBERLAKUAN PEMBATAAN SOSIAL B ERSKALA BESAR (PSBB) DI MASA PANDEMI COVID-19

OLEH :

KARINA KADIR
11770523409

Abstrak

*Penelitian ini dilatar belakangi oleh Corona Virus Diseases 2019 atau disebut dengan nama lain Covid-19 menjadi permasalahan yang banyak menyoroti perhatian masyarakat di berbagai belahan dunia. Sejak pertama sekali diketahui dari pasien yang terinfeksi Covid-19 di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada 8 Desember 2019, kini virus ini telah menyebar ke 216 negara, permasalahan yang ingin peneliti angkat dalam pelaksanaan penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan fungsi tambahan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Riau Kepri Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Masa Pandemi Covid-19, Apa saja hambatan dalam pelaksanaan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Riau Kepri Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Masa Pandemi Covid-19?, metode yang di gunakan dalam penelitian ini yakni dengan mengunakan metode Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel maupun lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel satu dengan variabel lainnya, dari pelaksanaan penelitian di atas maka peneliti memperoleh hasil penelitian yakni pelaksanaan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Riau-Kepri tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di Masa Pandemi Covid-19 sudah berjalan dengan baik hanya saja belum sepenuhnya dapat dikatakan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari indikator penelitian yang meneliti empat indikator. **Pertama**, perencanaan kegiatan ini telah sesuai dari turunnya peraturan kebijakan oleh pemerintah dan Kemenhub PSBB ini bisa menjadi perencanaan Jangka panjang ketika kita tidak mematuhi dan melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Dan perencanaan jangka pendek adalah apa saja yang kita butuhkan dilapangan karna dalam kurun waktu yang singkat. **Kedua**, Pengorganisasian dapat dilihat system yang digunakan dan pengaturan tugas teknis dilapangan **Ketiga**, Pelaksanaan sudah terkoordinasi dengan baik serta ada sanksi yang diterapkan jikalau kegiatan pelaksanaan ini ada yang tidak mematuhi. **Keempat**, Pengawasan disini yaitu evaluasi dan pemantauan yang dilakukan dalam pelaksanaan PSBB ini yaitu dengan menilai hasil laporan dilapangan*

Kata Kunci : Analisis, Pengelola Transportasi Darat, Covid-19, PSBB

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Syarif Kasim Riau

FUNCTION ANALYSIS OF LAND TRANSPORTATION MANAGEMENT CENTER REGION IV RIAU-KEPRI IN PEKANBARU REGION IN IMPLEMENTATION OF SOCIAL RESTRICTIONS B LARGE SCALE (PSBB) IN THE TIME COVID-19 PANDEMIC

BY :

Karina Kadir
11770523409

Abstrack

This research was motivated by Corona Virus Diseases 2019 or called by another name Covid-19 became a problem that highlighted the attention of many people in various parts of the world. Since it was first discovered from patients infected with Covid-19 in Wuhan, Hubei Province, China on December 8, 2019, this virus has now spread to 216 countries, the problem that researchers want to raise in carrying out this research is how to carry out the functions of the Regional Land Transportation Management Center. IV Riau Kepri Concerning Large-Scale Social Restrictions (PSBB) during the Covid-19 Pandemic used in this research, namely by using the method. The type of research used in this research is descriptive qualitative research. Descriptive is a research conducted to determine the value of independent variables, both one variable or more (independent) without making comparisons or connecting one variable with other variables, from the implementation of the research above, the researchers obtained the results of the research, namely the implementation of the functions of the Land Transportation Management Center for the Riau Region- The Riau Islands regarding Large-Scale Social Restrictions during the Covid-19 Pandemic has been going well, but it can't be said to be fully maximized. This can be seen from the research indicators that examine four indicators. First, the planning of this activity is in accordance with the issuance of policy regulations by the government and the Ministry of Transportation. This PSBB can become a long-term plan when we do not comply and implement it as well as possible. And short-term planning is what we need in the field because in a short period of time. Second, the organization can be seen from the system used and the arrangement of technical tasks in the field. Third, the implementation has been well coordinated and there are sanctions applied if any of these implementation activities do not comply. Fourth, supervision here is the evaluation and monitoring carried out in the implementation of this PSBB, namely by assessing the results of reports in the field

Keywords: Analysis, Land Transportation Manager, Covid-19, PSBB



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat islam.

Penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Riau-Kepri di Wilayah Pekanbaru dalam Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Masa Pandemi Covid-19”** ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata I prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kekhilafan, untuk itu kepada Allah SWT penulis meminta ampun dan kepada pembaca penulis meminta maaf. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah menjadi penyemangat dan membimbing selama berlangsungnya skripsi, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Hj. Dr. Mahyarni, SE, MM selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku ketua jurusan Administrasi negara UIN Suska Riau.
4. Bapak Mashuri, M.A selaku sekretaris jurusan Administrasi Negara UIN Suska Riau.
5. Bapak Jhon Afrizal, S.H.I, M.A selaku pembimbing akademik.
6. Bapak Rusdi S.Sos,M.A selaku dosen konsultasi proposal dan Ibuk Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M.Si selaku dosen konsultasi skripsi yang senantiasa membimbing dan memberikan masukan serta arahan kepada penulis.
7. Ibuk Abdiana Illosa, S.AP, M.PA selaku dosen yang memberikan ide dan gagasan dan selalu membimbing penulis.
8. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
9. Kedua orangtua, ayahanda Abdul Kadir dan ibunda Nur Efila Effendi serta Kedua kakak Annisa Al-Haq dan Hany Hasina Kadir serta keponakan tersayang Alula Farzana yang senantiasa membimbing, memberi kasih sayang dan do'a kepada penulis dan sebagai sumber kekuatan terbesar dalam penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

10. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fekonsos UIN Suska Riau dan Kohati Komisariat Fekonsos UIN Suska Riau yang selalu memberi support dan tempat saya berproses.

11. Teman-teman dekat, Winda Maghfirah, Betty Asmaya, Chania Alfiana, Annisya Nur Anmbiya, Hanna Indria, Dwi Yuniar Andini, Eliza Syafitri, dan Rizky Prasyo yang senantiasa membantu dan menjadi teman curhat yang selalu menemani penulis dengan baik yang selalu memberikan semangat, dorongan, dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-teman jurusan Administrasi Negara lokal A angkatan 2017 yang sama-sama berjuang dalam proses penelitian dan selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua doa, semangat dan motivasi yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin ya rabbal alamin.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, Agustus 2021
Penulis

Karina Kadir
11770523409

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Manajemen Publik	12
2.2. Fungsi- Fungsi Manajemen Publik	13
2.3. Pengertian Pengelolaan.....	16
2.4. Fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Riau-Kepri (BPTD IV)	18
2.5. Pandangan Islam Tentang Manajemen (Pengelolaan).....	20
2.6. Penelitian Terdahulu	22
2.7. Definisi Konsep	25
2.8. Konsep Operasional	27
2.9. Kerangka Pemikiran	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	30
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	31
3.4. Informan Penelitian.....	32

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1. Sejarah Balai Pengelolaan Transportasi darat Wilayah IV Riau-Kepri	34
4.2. Visi dan Misi Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IV Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.....	39
4.3 Tujuan dan Sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IV	40
4.4 Tipologi Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IV Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau	41
4.5 Tugas Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IV Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau	41
4.6 Struktur Organisasi BPTD Tipe A Serta Posko- Posko PSBB.....	45

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Pelaksanaan Fungsi (Balai Pengelola Transportasi Darat) BPTD IV Riau-Kepri terhadap Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Masa Pandemi Covid-19	47
5.2. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) IV Riau-Kepri tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Masa Pandemi Covid-19.....	57

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan	60
6.2. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Olahan Peneliti berdasarkan Laporan dari Kasubbag Umum 29 April- 12 Mei 2020.....	6
Tabel 1.2	Data Olahan Peneliti berdasarkan Laporan dari Kasubbag Umum 29 April- 12 Mei 2020.....	7
Tabel 2.1	Variabel Penelitian	28
Tabel 3.1	Data olahan peneliti tahun 2021	33
Tabel 5.1	Uraian Tugas	53
Tabel 5.2	Laporan Harian Satpel.....	56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	45
Gambar 4.2 Posko PSBB	46





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Corona Virus Diseases 2019 atau disebut dengan nama lain Covid-19 menjadi permasalahan yang banyak menyoroti perhatian masyarakat di berbagai belahan dunia. Sejak pertama sekali diketahui dari pasien yang terinfeksi Covid-19 di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada 8 Desember 2019, kini virus ini telah menyebar ke 216 negara (WHO, 13 Juni 2020). Pandemi Covid-19 ini tidak hanya mengancam kesehatan manusia, namun juga telah memengaruhi kemerosotan ekonomi dunia (Shangguan, Wang, & Sun, 2020).

Penyebaran virus Corona yang sudah semakin besar di Indonesia, mendesak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengambil langkah preventif untuk memutus rantai penularan Corona. Salah satunya adalah dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa titik daerah yang termasuk zona merah maupun kuning yang berada di daerah Indonesia. Khususnya kota Pekanbaru sendiri.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ditetapkan pada 31 Maret 2020. Pemerintah Daerah (Pemda) dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu. PSBB dilakukan dengan pengusulan oleh gubernur/bupati/walikota kepada Menteri Kesehatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 ditetapkan pada 3 April 2020. Kebijakan PSBB antara lain: 1) Peliburan sekolah dan tempat kerja; 2) Pembatasan kegiatan keagamaan; 3) Pembatasan kegiatan di tempat/fasilitas umum; 4) Pembatasan kegiatan sosial budaya; 5) Pembatasan moda transportasi; dan 6) Pembatasan kegiatan lainnya terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Belakangan ini, banyak desakan terhadap pemerintah untuk mengambil langkah strategis seperti *Lockdown*, *Sosial Distancing* di keramaian. Serta upaya lainnya dari beberapa instansi Pemerintah yg terkait penanganan akan wabah Covid-19 ini. Dan berdasarkan Surat Edaran PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penerapan *Lockdown* atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diyakini merupakan cara paling ampuh untuk menekan laju penularan pandemi Corona Virus atau Covid 19. Hal ini dapat kita lihat dalam berbagai langkah yang diambil pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yaitu dengan menganjurkan atau menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pembatasan-pembatasan kegiatan pada sektor-sektor tertentu termasuk juga menekankan kepada masyarakat untuk menunda terlebih dahulu kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang hingga dalam aksi nyata berbagai sektor mulai memberlakukannya sehingga himbauan Presiden untuk bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah telah mulai gencar dilakukan.

Pada 7 April 2020, Menkes menyetujui PSBB untuk diterapkan di DKI Jakarta. PSBB dilakukan selama 14 hari. Dan PM 25 Tahun 2020 merupakan landasan dari Kemenhub melaksanakan PSBB ini. Saat ini, pemerintah bekerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

keras dalam memberikan jaminan perlindungan kesehatan dari pandemi Corona Virus atau *Covid 19*. Dalam rangka memberikan jaminan tersebut, pemerintah terus berupaya mengurangi jumlah kelompok terinfeksi dengan perlindungan berupa pengawasan dari wabah Covid-19 ini dengan memberlakukan PSBB ini. Satgas yang ditugaskan tidak hanya institusi-institusi didalam ruang lingkup Dirjenhubdat saja melainkan ada institusi lain seperti yang ikut andil ada dari pelaksanaan PSBB ini yaitu Kemenkes, Polri, TNI, Pol PP, Nakes . Dalam hal ini Balai Transportasi Darat Wilayah IV Riau-Kepri sebagai lembaga yang termasuk yang ikut diberikan perintah atau tugas dan fungsi tambahan dalam menyelenggarakan dan melaksanakan PSBB di beberapa titik yang masuk di dalam areanya. Membuat pos di beberapa titik dan bekerjasama dengan beberapa gugus tugas satgas seperti yang disebutkan diatas.

Kedudukan Balai Transportasi Darat Wilayah IV Riau-Kepri (BPTD IV) yaitu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat, yang mana garis instruktif nya langsung dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI. Sebagai UPT di tingkat Provinsi Riau-Kepri BPTD IV Riau-Kepri mempunyai tugas atau fungsi tambahan di Masa Pandemi Covid-19 ini yaitu tertera didalam Surat Edaran PP Nomor 21 Tahun tentang PSBB ini.

Menindak lanjuti Surat Edaran Menteri Kementerian Perhubungan di dalam PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*(Covid-19). Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Peliburan sekolah dan tempat kerja;
2. Pembatasan kegiatan keagamaan;
3. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
4. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya;
5. Pembatasan moda transportasi; dan
6. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Dan juga menanggapi Surat Edaran (SE) Kasatgas Nomor 4 Tahun 2020 tentang protokol kesehatan perjalanan orang dalam masa pandemi *Corona Virus Disease* (Covid 19) yang mana terletak dipasal 4 dan pasal 6 nya menyatakan :

Pasal 4

- 1) Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:
 - a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
 - b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
 - c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
- 2) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk.
- 3) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Pasal 6

- 1) Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar diusulkan oleh gubernur/bupati/walikota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- 2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan memperhatikan pertimbangan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- 3) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dapat mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah tertentu.
- 4) Apabila menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menyetujui usulan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah di wilayah tertentu wajib melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Maka berdasarkan dari itu BPTD Wilayah IV melakukan upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Wilayah Kerja BPTD Wilayah IV Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai upaya untuk melaksanakan Pencegahan Penyebaran COVID-19, bersama ini dapat kami laporkan bahwa BPTD Wilayah IV Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau telah membentuk Posko Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada beberapa titik yang ada diwilayah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut bernama Pos Pengamanan dan di setiap Satuan Pelayanan di wilayah kerja kami untuk mendukung kegiatan Tanggap Darurat Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Selain membentuk Posko Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Kantor Induk BPTD dan pada setiap Satuan Pelayanan, BPTD Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepulauan Riau turut membuka Posko Pengawasan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlokasi di beberapa Jalan Nasional dan Jalan Provinsi di beberapa titik perbatasan wilayah yang berfungsi sebagai Pos Pemantauan Pencegahan Penyebaran COVID-19 dan Pos Pengawasan PSBB guna mendukung Kota Pekanbaru dalam melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Tabel 1.1 Data Olahan Peneliti berdasarkan Laporan dari Kasubbag Umum 29 April- 12 Mei 2020

DAFTAR POSKO PENGAWASAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) BPTD WILAYAH IV PROVINSI RIAU DAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU DI WILAYAH PERBATASAN PINTU MASUK KOTA PEKANBARU	
1	POSKO PSBB BPTD IV LOKASI : SEKITARAN SPBU TERATAK BULUH – (BTS. KOTA PEKANBARU – KAB. KAMPAR)
2	POSKO PSBB BPTD IV LOKASI : SEKITARAN LINTAS TIMUR SPBU KULIM ATAS – (BTS. KOTA PEKANBARU – KAB. PELALAWAN)
3	POSKO PSBB BPTD IV LOKASI : SEKITARAN MASJID BAITURRAHMAN, GARUDA SAKTI – (BTS. KOTA PEKANBARU – KAB. KAMPAR)
4	POSKO PSBB BPTD IV LOKASI : SEKITARAN SPBU RIMBO PANJANG – (BTS. KOTA PEKANBARU – KAB. KAMPAR)
5	POSKO PSBB BPTD IV LOKASI : SEKITARAN POLSEK RUMBAI – (BTS KOTA PEKANBARU – KAB. SIAK)

Sumber : Data Olahan Peneliti berdasarkan Laporan dari Kasubbag Umum 29 April- 12 Mei 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data sebaran yang ada 5 Posko check point PSBB di BPTD IV Wilayah Riau-Kepri perbatasan masuk Kota Pekanbaru. Mengenai pos-pos pencegahan Covid-19 tersebut ada sebanyak 5 Titik Posko PSBB untuk pos pengamanan Covid-19 . Dan letaknya tersebar diseluruh perbatasan masuk ke Kota Pekanbaru bagian daerah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau . Ada 6 posko yang berada diluar jangkauan peneliti yaitu di beberapa titik diluar Provinsi Riau, terdiri dari posko Bandar Payung sekaki, Posko Bangkinang-Kab.Kampar, terminal tipe A Dumai- Kota Dumai, Posko UPPKB Muara lembu- Kuansing, dan Posko Penyeberangan kota Dumai- Kota Dumai. Peneliti meneliti posko yang ada diperbatasan kota Pekanbaru-Riau mengingat Kantor BPTD IV Riau-Kepri ini berada di jangkauan peneliti yaitu di jalan Cemaat Kota Pekanbaru Riau. Posko ini terlaksana berdasarkan PM 25 Tahun 2020. Terhitung dari tanggal 29 April- 12 Mei 2020 dengan 3 shift pengamanannya setiap harinya. Shift 1 dari jam 8 pagi sampai 2 siang. Shift ke 2 dari jam 4 sore-10 malam. Shift ke 3 dari jam 10 malam sampai jam 7 pagi.

Tabel 1.2 Data Olahan Peneliti berdasarkan Laporan dari Kasubbag Umum 29 April- 12 Mei 2020

No.	POSKO PSBB BPTD IV LOKASI	Putar Balik
1	SEKITARAN SPBU TERATAK BULUH – (BTS. KOTA PEKANBARU – KAB. KAMPAR)	50 Kendaraan
2	SEKITARAN LINTAS TIMUR SPBU KULIM ATAS – (BTS. KOTA PEKANBARU – KAB. PELALAWAN)	44 Kendaraan
3	SEKITARAN MASJID BAITURRAHMAN, GARUDA SAKTI – (BTS. KOTA PEKANBARU – KAB. KAMPAR)	63 Kendaraan
4	SEKITARAN SPBU RIMBO PANJANG – (BTS. KOTA PEKANBARU – KAB. KAMPAR)	37 Kendaraan
5	SEKITARAN POLSEK RUMBAI – (BTS KOTA PEKANBARU – KAB. SIAK)	31 Kendaraan
Jumlah		225Kendaraan

Sumber : Data Olahan Peneliti berdasarkan Laporan dari Kasubbag Umum 29 April- 12 Mei 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedikitnya ada 225 kendaraan arus mudik di lima pintu check point perbatasan keluar masuk perbatasan kota Pekanbaru - Riau disuruh memutar balik kendaraannya, lantaran tidak memiliki alasan yang jelas. Pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) covid-19 dari tanggal 29 April hingga 12 Mei selama 14 harian pantauan minggu awal. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwasannya tingkat pelanggaran tertinggi terjadi pada Posko pintu sekitaran Masjid Baiturrahman Garuda Sakti Batas Pekanbaru – Kabupaten Kampar sebanyak 63 kendaraan, dan terendah yaitu posko pintu masuk sekitaran Polsek Rumbai Batas Pekanbaru- Siak . Sumber data yang saya dapat ini merupakan data primer dan sekunder. Data sekunder disini yang mana penelitiannya memfokuskan di Kantor BPTD IV Riau-Kepri.

Berdasarkan hal diatas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“Analisis Fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Riau-Kepri Di Wilayah Pekanbaru Dalam Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Masa Pandemi Covid-19 ”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah dalam penelitan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Riau Kepri Di Wilayah Pekanbaru Dalam Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Masa Pandemi Covid-19 ?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Riau Kepri Di Wilayah Pekanbaru

1.3. Tujuan Penelitian

- Dalam Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Masa Pandemi Covid-19?
1. Untuk mengetahui fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Riau Kepri Di Wilayah Pekanbaru Dalam Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Masa Pandemi Covid-19
 2. Untuk mengetahui fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Riau Kepri Di Wilayah Pekanbaru Dalam Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Masa Pandemi Covid-19

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk digunakan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Merupakan sarana informasi untuk meningkatkan wawasan dan Untuk mengembangkan teori Kinerja Pegawai serta sebagai Untuk mengembangkan pola berfikir melalui penulisan ini dan melatih penulis dalam menerapkan teori-teori yang didapat selama kuliah.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pengetahuan dan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu tentang fungsi dari kinerja sehingga dapat menghasilkan penentu sumber daya manusia yang lebih baik. Diharapkan dapat menjadi salah satu pemikiran bagi pihak Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Riau-Kepri dalam rangka menganalisis tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

(PSBB) di Masa Pandemi Covid-19 dan sebagai bahan perbandingan dan sumber informasi dalam penelitian selanjutnya di masa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih sistematis dan terarah maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini sebagai pendahuluan dimana peneliti menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini peneliti mengemukakan landasan teori yang berhubungan dengan judul penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini digunakan untuk menguraikan tentang lokasi penelitian, jenis penelitian dan sumber data, metode pengumpulan data dan Teknik analisis data kualitatif.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berbicara tentang gambaran umum lokasi, baik itu berbicara tentang sejarah ataupun bagaimana keadaan daerah tersebut.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memuat hasil dari pembahasan dari penelitian pembahasan yang dilakukan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat diketahui maksud dan tujuan dari penelitian ini.

BAB VI PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca dan lembaga pendidikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Manajemen Publik

Pengertian manajemen publik menurut para ahli yang akan disebutkan tergantung latar belakang pendidikan, pengalaman, atau perspektif yang dianut oleh para ahli tersebut. Diantarnya pengertian manajemen publik adalah sebagai berikut:

Menurut Nor Ghofur (2014) Mengartikan bahwa manajemen publik adalah manajemen pemerintah, yang artinya manajemen publik juga bermaksud untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian Manajemen Publik Menurut Shafritz dan Russel (dalam Kebab, 2008:93) diartikan sebagai upaya seseorang untuk bertanggungjawab dalam menjalankan suatu organisasi, dan pemanfaatan sumber daya (orang dan mesin) guna mencapai tujuan organisasi.

Overman mengemukakan dalam Keban (2004:85) bahwa manajemen publik bukanlah “scientific management”, meskipun sangat dipengaruhi oleh “scientific management”. Manajemen publik bukanlah “policy analysis”, bukanlah juga administrasi publik, merefleksikan tekanan-tekanan antara orientasi politik kebijakan di pihak lain. Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti planning, organizing dan controlling satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lain.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terakhir, Donovan dan Jackson memaparkan (2013:11-12) manajemen publik diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan dengan serangkaian keterampilan (skill).

2.2 Fungsi-Fungsi Manajemen Publik

Fungsi-fungsi Manajemen Publik adalah elemen-elemen dasar yang selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen publik. Akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Namun terdapat perbedaan pandangan mengenai fungsi-fungsi manajemen publik oleh beberapa ahli. Sebenarnya Fungsi-fungsi Manajemen Publik ini bisa diambil dari Fungsi-fungsi Manajemen. Bedanya terletak di orientasinya. Manajemen lebih kepada sektor swasta dan bersifat profit. Sedangkan Manajemen Publik lebih kepada sektor publik dan bersifat nonprofit atau pelayanan.

Menurut Henry Fayol (Safroni, 2012:179), fungsi-fungsi Manajemen meliputi Perencanaan (planning), Pengorganisasian (organizing), Pengarahan (commanding), Pengkoordinasian (coordinating), Pengendalian (controlling).

Menurut Ricki W. Griffin (Ladzi Safroni, 2012:44), fungsi-fungsi manajemen meliputi Perencanaan dan Pengambilan Keputusan (planning and decision making), pengorganisasian (organizing), Pengarahan (leading) serta pengendalian (controlling).

Adapun penjelasan mengenai fungsi-fungsi manajemen dan bisa dijadikan Fungsi-fungsi Manajemen Publik menurut ahli Henry Fayol adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Perencanaan (Planning)

Perencanaan (planning) adalah fungsi dasar (fundamental) manajemen, karena pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengendalian pun harus terlebih dahulu direncanakan.

2. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokkan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan departemen-departemen (subsistem) dan penentuan hubungan-hubungan.

3. Pengarahan (Commanding)

Fungsi pengarahan (commanding) merupakan fungsi yang dapat diterapkan setelah rencana, organisasi, dan karyawan ada. Jika fungsi ini diterapkan maka proses manajemen dalam merealisasi tujuan bisa dimulai.

4. Pengkoordinasian (Coordinating)

Setelah dilakukan pendelegasian wewenang dan pembagian pekerjaan kepada para karyawan oleh manajer, langkah selanjutnya adalah pengkoordinasian. Setiap bawahan mengerjakan hanya sebagian dari pekerjaan perusahaan, karena itu masing-masing pekerjaan bawahan harus disatukan, diintegrasikan, dan diarahkan untuk mencapai tujuan. Tanpa koordinasi tugas dan pekerjaan dari setiap individu karyawan maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai. Koordinasi itu sangat penting di dalam suatu organisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Beberapa alasan mengapa pengkoordinasian sangat penting, yaitu:

1. Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percekocokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan.
2. Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan perusahaan/organisasi.
3. Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.
4. Supaya semua unsur manajemen (6M) dan pekerjaan masing-masing individu karyawan harus membantu tercapainya tujuan organisasi.
5. Pengendalian (controlling)

Fungsi pengendalian (controlling) adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Prinsip Manajemen Publik meliputi, Menurut Henry Fayol, seorang industrialis asal Perancis, prinsip-prinsip dalam manajemen sebaiknya bersifat lentur dalam arti bahwa perlu di pertimbangkan sesuai dengan kondisi-kondisi khusus dan situasi-situasi yang berubah. Prinsip - prinsip umum manajemen menurut Henry Fayol terdiri dari:

1. Pembagian Kerja
2. Wewenang dan Tanggung Jawab
3. Disiplin
4. Kesatuan Perintah
5. Kesatuan Pengarahan
6. Mengutamakan Organisasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pengajian Pegawai
8. Ketertiban
9. Keadilan dan Kejujuran
10. Semangat Kesatuan

2.3 Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata manajemen atau administrasi. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Husaini Usman (2004:3) Management diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Dalam beberapa konteks keduanya mempunyai persamaan arti, dengan kandungan makna to control yang artinya mengatur dan mengurus.

Menurut Balderton (dalam Adisasmita, (2011:21) istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Adisasmita (2011:119) mengemukakan bahwa Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut M. Manullang (2006:10) manajemen merupakan sebuah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Menurut Sahdan, dkk. (2006:22) pengelolaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Fattah (2004:11) dalam proses manajemen terlihat terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pemimpin (leading) dan pengawasan (controlling). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganisir, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.

Disini ada beberapa tujuan pengelolaan :

1. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
2. Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling bertentangan.
3. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi.
4. Untuk mencapai efisien dan efektivitas, suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, Afifiddin (2010:3) menyatakan bahwa langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut :

1. Menentukan strategi
2. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
3. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu.
4. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana.
5. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
6. Menentukan ukuran untuk menilai
7. Mengadakan pertemuan
8. Pelaksanaan
9. Mengadakan penilaian
10. Mengadakan review secara berkala
11. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang.

Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan bahwa tujuan pengelolan tidak akan terlepas dari manfaat sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi bisa tercapai.

2.4 Fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Riau-Kepri (BPTD IV)

Tugas dan Fungsi Utama dari BPTD IV Riau-Kepri ini yaitu :

1. Tugas

Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe A Wilayah IV Bertugas Melaksanakan pengelolaan Transportasi Darat di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau Danau,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Fungsi

- a. Pelaksanaan rencana, program, dan anggaran urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat
- b. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)
- c. Pelaksanaan Kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor dan pemeriksaan fisik perancang bangun sarana angkutan jalan.
- d. Pelaksanaan pengawasan teknis pengujian berkala kendaraan bermotor dan sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional
- e. Pengawasan angkutan dan industri karoseri
- f. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Pengawasan Angkutan Orang, Angkutan Barang, Penyidikan dan pengusulan sanksi, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan
- g. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan yang belum diusahakan secara komersial (Perintis)

Tugas Tambahan : Ikut serta dalam melakukan Pencegahan Penyebaran Corona Virus dengan mendirikan Pos dan Penyekatan di beberapa titik yang telah ditentukan oleh Dirjenhubdat dan Kemenhub.

2.5 Pandangan Islam Tentang Manajemen (Pengelolaan)

Dalam konteks islam manajemen disebut juga dengan *I'darath*. Menurut S. Mahmud Al-Hawary manajemen (al-idarah) ialah yang artinya: manajemen adalah mengetahui kemana yang dituju, kesukaran apa yang harus dihindari, kekuatan-kekuatan apa yang dijalankan dan bagaimana mengemudikan kapal anda serta anggota dengan sebaik-baiknya tanpa pemborosan waktu dalam proses mengerjakannya. Menurut Ketua Dewan Penasihat Majelis Ulama Indonesia, Prof KH Ali Yafie, dalam Islam manajemen dipandang sebagai perwujudan amal soleh yang harus bertitik tolak dari niat baik. Niat baik tersebut akan memunculkan motivasi aktivitas untuk mencapai hasil yang bagus demi kesejahteraan bersama. Dari ta'rif di atas memberi gambaran bahwa manajemen merupakan kegiatan, proses dan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan akhir secara maksimal dengan bekerja sama sesuai jobnya masing-masing. Maka kebersamaan dan tujuan akhirnya yang menjadi fokus utama.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا
إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ
مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya... (Al-Baqarah; 286)

Kinerja bersama dalam organisasi disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Menyatukan langkah yang berbeda tersebut

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlu ketelatenan mengorganisir sehingga bisa berkompetitif dalam berkarya. Disamping ayat di atas, Sayyidina Ali bin Abi Thalib membuat statemen yang terkenal yaitu, Statemen Sayyidina Ali merupakan pernyataan yang realistis untuk dijadikan rujukan umat Islam. Hancurnya suatu institusi yang terjadi saat ini karena belum berjalannya ranah organisasi dengan menggunakan manajemen yang benar secara maksimal.

- (التنسيق) atau Coordination Yaitu upaya untuk mencapai hasil yang baik dengan seimbang, termasuk diantara langkah-langkah bersama untuk mengaplikasikan planning dengan mengharapkan tujuan yang diidamkan. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam keseluruhannya dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuhmu yang nyata. (Al-Baqarah; 208)

Apabila manusia ingin mendapatkan predikat iman maka secara totalitas harus melebur dengan peraturan Islam. Iman bila diumpamakan dengan manusia yang ideal dan Islam sebagai palanning dan aturan-aturan yang mengikat bagi manusia, maka tercapainya tujuan yang mulia, memerlukan adanya kordinasi yang baik dan efektif sehingga akan mencapai kepada tujuan ideal. Cobaan dan kendala merupakan keniscayaan, namun dengan manusia tenggelam dalam lautan Islam (kedamaian, kerjasama dan hal-hal baik lainnya) akan terlepas dari kendala-kendala yang siap mengancam.

- (الرقابة) atau Controling Yaitu pengamatan dan penelitian terhadap jalannya planning. Dalam pandangan Islam menjadi syarat mutlak bagi pemi mpin untuk

lebih baik dari anggotanya, sehingga kontrol yang ia lakukan akan efektif. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? (Itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan (Ash-Shaff;2-3) .

2.6 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan tiga penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang “Analisis Fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Riau-Kepri Tentang Pembatasan Berskala Besar di Masa Pandemi Covid-19”

1. Efi Sutri Asih tahun 2015 dengan judul “Analisis Pengelolaan Pelayanan Air Bersih Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kampar Kabupaten Kampar”.

Hasil penelitian : berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan pelayanan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pelayanan air bersih oleh perusahaan daerah air minum (PDAM) tirta Kampar berada dalam kategori baik sesuai dengan hasil 76,75% responden yang menyatakan baik. Namun menurut hasil wawancara dari pelanggan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan masih kurang baik, adapun kesalahan yang dimaksud adalah dari segi kualitas air yang dihasilkan nya. Aliran air yang macet dan tanggapan perusahaan yang lambat terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peneliti setuju akan hal tersebut karena jikalau air yang sampai kepada konsumen itu idak baik dan akan berpengaruh kepada perusahaan. Persamaan dari skripsi tersebut peneliti mengambil teori tentang pengelolaan yang juga berhubungan dengan yang peneliti teliti. Perbedaan nya terletak pada objek yang diteliti oleh peneliti yang akan meneliti.

Jurnal Oleh Dian Herdiana Berjudul : Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sebagai Upaya Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Artikel ini membahas upaya pemerintah untuk mengatasi Covid-19 yang telah menyebar ke semua provinsi. Pemerintah pusat telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana non-alami sehingga upaya penanggulangannya dikoordinasikan langsung oleh pemerintah pusat.

Peneliti sepakat akan hal ini PSBB dipilih oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengatasi Covid-19 dan dilaksanakan di beberapa daerah yang memiliki kasus infeksi Covid-19 yang tinggi, dan tentunya harus dibarengi dengan kesadaran dan kepatuhan dari masyarakat. Persamaan yang akan dibahas disini kurang lebih akan menjurus kepada PSBB nya, peneliti mengambil fokus pembahasan sama terkait Covid-19 yang juga berhubungan dengan yang akan peneliti teliti. Perbedaan nya terletak pada peneliti focus kepada Manajemen Publik bukan membahas kebijakannya.

Jurnal Oleh Dwi Putri Robiatul berjudul : Kebijakan PSBB Pemerintah Kota Surabaya dalam Menyegah Penyebaran Virus Covid-19. Kebijakan PSBB yang diambil oleh Pemerintah Kota Surabaya tentunya dengan pertimbangan yang matang agar dapat mencegah penyebaran Covid-19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut peneliti faktor kenapa langkah ini diambil itu berdasarkan kepada Perencanaan Komunikasi physical distancing ini dapat mempengaruhi beberapa aspek mulai dari dari aspek Perilaku (Behavior), Pengetahuan (Knowledge), dan Sikap (Attitude). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efek Komunikasi PSBB terhadap sikap pencegahan virus corona masyarakat di Surabaya. Saya sangat setuju dengan hasilnya karena semua itu tergantung kepada kerjasama masrakat dengan pemerintah mengenai kesadaran masyarakat akan mematuhi protocol kesehatan yang ketat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Persamaan dari artikel jurnal terhadap penelitian yang akan peneliti teliti yaitu terdapat pada pembahasan sama terkait Covid-19 dan PSBB tentunya.

4. Jurnal Oleh Ilham Nasimul Firdaus berjudul Media Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Berdampak Sektor ke Sosial dan Ekonomi. Yang mana Kasus virus COVID-19 yang menyebar luas menjadi pandemi mengakibatkan diterapkannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebagai upaya untuk menekan perluasan penyebaran virus COVID-19 akibat belum ditemukannya anti-virus ini. Berdampak pada beberapa sektor sosial hingga ekonomi yang menyebabkan berlakunya WFH (Work From Home), pengurangan gaji, bahkan kehilangan pekerjaan dan terkena PHK.

Peneliti setuju akan penelitian ini bahwasannya kenapa kebijakan ini masih banyak belum ditaati oleh masyarakat karena pekerjaannya yang mengandalkan upah harian. Persamaan skripsi tersebut peneliti mengambil

fokus pembahasan sama terkait Covid-19 dan juga tentang PSBB yang juga berhubungan dengan yang akan peneliti teliti.

5. Jurnal Oleh Vikram Palulessy berjudul Efektivitas Penerapan Sanksi Selama Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pada Penanggulangan COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas penerapan sanksi selama pemberlakuan PSBB di Kota Makassar hal ini mempunyai beberapa kendala dalam hasil untuk menemukan pelanggar – pelanggar selama penerapan PSBB di Kota Makassar yang dimananya adanya beberapa masyarakat yang masih acuh dengan penerapan protokol kesehatan dan peraturan yang di tetapkan oleh pemerintah mengenai penerapan PSBB di Kota Makassar.

Menurut peneliti artikel ini kurang membahas kenapa masyarakat berperilaku seperti tidak adanya kesadaran bahkan melanggarnya, akan lebih baik diuraikan juga agar pembacapun tahu mengenai akan hal ini. Persamaan dari penelitian ini dengan yang akan diteliti peneliti yaitu mengambil fokus pembahasan sama terkait sanksi dan perilaku masyarakat mengenai diberlakukannya kebijakan PSBB ini.

2.7 Definisi Konsep

Menurut Singarimbun dan Effendi (2009) menyatakan bahwa definisi konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Untuk memudahkan analisa agar dapat kesatuan pengertian dalam penelitian, maka penulis memberikan definisi konsep :

1. Manajemen Publik merupakan cabang keilmuan dari administrasi publik yang membahas mengenai restrukturisasi organisasi, sistem penganggaran, manajemen sumberdaya dan evaluasi program
2. Fungsi (bahasa), dalam linguistik berarti suatu cara untuk mencapai tujuan dengan menggunakan bahasa tersebut
3. Pengelolaan adalah Menurut Balderton (dalam Adisasmita, (2011:21) istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.
4. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Riau-Kepri adalah Suatu Instansi merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat
5. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah istilah kekarantinaan kesehatan di Indonesia yang didefinisikan sebagai "Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. PSBB merupakan salah satu jenis penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah, selain karantina rumah, karantina rumah sakit, dan karantina wilayah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

6. Masa Pandemi Covid-19 adalah Masa atau waktu disaat adanya peristiwa menyebarnya Penyakit koronavirus 2019 (Bahasa Inggris: *Coronavirus disease 2019*, disingkat COVID-19) di seluruh dunia untuk semua Negara. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020.

2.8 Konsep Operasional

Defenisi operasional adalah cara yang digunakan untuk menjawab masala penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian. Konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan tentang surat edaran (SE) tentang petunjuk operasional transportasi. Hal tersebut untuk menindaklanjuti terbitnya Surat Edaran (SE) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 ,19 Nomor 4 Tahun 2020 (SE Gugus Tugas) tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 pada 6 Mei 2020. Pengendalian transportasi yang dilakukan Kemenhub sejalan dengan yang ditetapkan di surat edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, hal tersebut dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan memberlakukan protokol kesehatan yang ketat, meningkatkan keberhasilan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan transportasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan nasional selama darurat bencana non-alam Covid-

Indikator penelitian dalam tulisan ini Menurut Henry Fayol (Safroni, 2012:179), fungsi-fungsi manajemen meliputi Perencanaan (planning), Pengorganisasian (organizing), Pengarahan (commanding), Pengawasan (controlling) dan dijelaskan dengan tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Variabel Penelitian

Referensi	Indikator	Sub Indikator
Fungsi Manajemen Publik Menurut Henry Fayol (Dalam Jurnal Burhanudin Gesi, Manajemen,2019, Volume 3 No.2)	1. Perencanaan	a. Perencanaan jangka panjang b. Perencanaan jangka pendek
	2. Pengorganisasian	a. Sistem yang di gunakan b. Pengaturan kegiatan
	3. Pelaksanaan	a. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan b. Sanksi
	4. Pengawasan	a. Jangka waktu pelaksanaan b. Evaluasi Pelaksanaan

Sumber : Data Olahan Peneliti berdasarkan Burhanudin gesi, Jurnal Manajemen, Publik, 2019, Volume 3 No 2

2.9 Kerangka Pemikiran

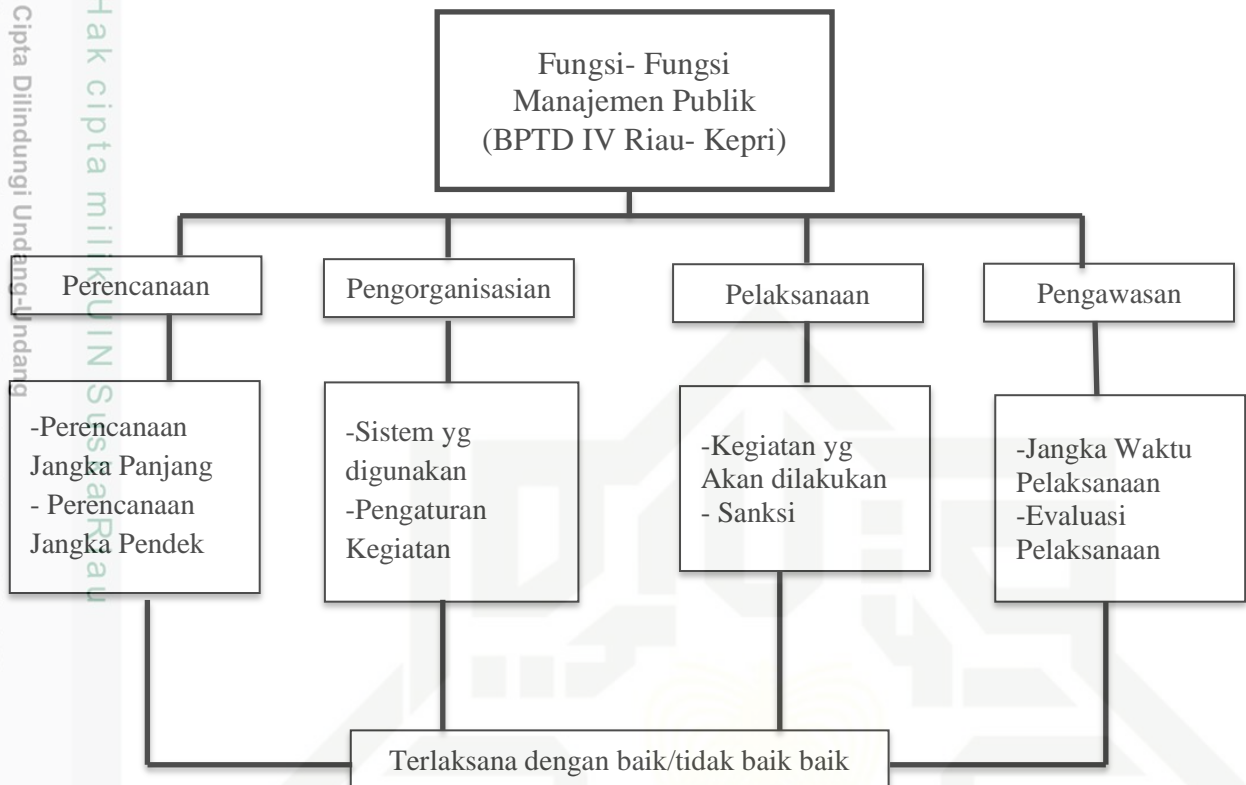
Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang urgen. Pada dasarnya kerangka berpikir adalah penjelasan sementara mengenai objek penelitian yang menjadi permasalahan pada penelitian yang akan dilakukan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber : diolah oleh penulis dari berbagai sumber (Burhanuddin Gesi, Jurnal Manajemen, Publik, Volume 3 Nomor 2

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah IV Riau-Kepri. Adapun waktu pelaksanaan penelitian yaitu dari bulan April - Mei 2021

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiono (2011:13-14) deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel maupun lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel satu dengan variabel lainnya.

Kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat, kata dan gambaran. Menurut Muhammad Idrus (2009) penelitian kualitatif meneliti informan sebagai subjek penelitian dalam lingkungan hidup kesehariannya. Pemahaman akan simbol-simbol dan bahasa asli masyarakat menjadi salah satu kunci penelitian ini. Saya memakai penelitian berjenis kualitatif ini karena penelitian saya ini membutuhkan pemahaman yang lebih detail dan mendalam.

Penelitian kualitatif sangat cocok dilakukan saat kondisi ini. Karena sifatnya yang elaborative, penelitian kualitatif dapat dengan mudah membantu peneliti untuk menggali informasi yang lebih dalam terkait suatu topik penelitian yang nantinya informasi yang didapatkan dapat digunakan untuk menentukan tujuan penelitian.

Adapun sumber data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber guna memperoleh jawaban yang relevan dari permasalahan. Data primer tersebut menyangkut tentang identitas informan dan tanggapan pegawai terhadap perilaku memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah jadi dan diperoleh dari instansi-instansi terkait dengan masalah penelitian ini yang diperlukan sebagai pelengkap landasan penelitian. Data ini berupa data tentang daerah penelitian, arsip-arsip, laporan tertulis dan lain sebagainya yang dikeluarkan instansi pemerintah yang dapat menunjang representatifnya penelitian ini.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Untuk melaksanakan penelitian yang sesuai dengan apa yang diharapkan tentu kita harus mencari data, informasi, dan keterangan-keterangan berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan. Adapun teknik pengumpulan yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusundari pelagai proses biologis dan psikologis, dua diantaranya yan terpentingadalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Sutrisno, (2010:145). Atau dengan kata lain suatu penyelidikan yang dijalankan secara sistematis dan denganmenggunakan alat indra terutama mata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap kejadian-kejadian yang langsung. Peneliti melakukan ini agar mendapatkan data seakurat mungkin agar dapat seobjektif mungkin dalam meneliti Posko PSBB yang ditaja oleh BPTD IV Riau – Kepri.

2. Wawancara

Wawancara (interview) yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan proses komunikasi secara langsung dengan melakukan Tanya jawab kepada responden seputar informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, dengan menggunakan pedoman daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu. Peneliti membutuhkan paparan langsung dan jelas dari subjek yang melaksanakan langsung apa yang diteliti.

3. Dokumentasi

Metode ini merupakan berupa dokumentasi data, jumlah pegawai, profil dan struktur organisasi serta data-data lainnya dari kantor BPTD-IV Riau-Kepri. Merupakan hal penting untuk kearsipan dan bukti lainnya.

3.4 Informan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, sehingga dalam penelitian ini tidak dikenal adanya sampel, melainkan informan. Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2000: 97) Dalam hal ini peneliti menggunakan metode Purposive Sampling . Yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu (Sugiyono, 2008). Purposive sampling juga disebut sebagai sampel penilaian atau pakar adalah jenis sampel nonprobabilitas. Pertimbangan peneliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan purposive sample ini adalah untuk menghasilkan sampel/informan secara logis dapat dianggap mewakili populasi. Peneliti memakai metode ini agar sampel/informan yang diambil memenuhi standar yang dibutuhkan dalam mendukung penelitian.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1 orang
2	Kepala Seksi LLAJ	1 orang
3	PPNPN Bidang Teknis Operasional	3 orang
4	PPNPN Bidang Administrasi Perkantoran	2 orang
5	Staff Pengatur Analisis LLAJ	2 orang
Jumlah		9 orang

Sumber: Data olahan peneliti tahun 2021

Analisa yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cara Deskriptif kualitatif (menggambarkan dan memaparkan) kinerja pegawai Kantor Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah IV Riau-Kepri. Setelah data yang diperlukan diperoleh, maka kemudian data tersebut akan diolah secara kualitatif. Selanjutnya data tesebut dikumpulkan dan data tersebut diklasifikasikan dalam bentuk tabel-tabel persentase dan penjelasan-penjelasan, kemudian hasil dari pembahasan ini dirumuskan suatu kesimpulan. Data yang diperoleh dipaparkan secara deskriptif analistis yaitu suatu analisa yang menggambarkan atau menceritakan secara jelas berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Balai Pengelolaan Transportasi darat Wilayah IV Riau-Kepri

Kantor Balai Penglolaan Tranporasi darat Wilayah IV ini berada di Jl. Cemara Kota Pekanbaru, sejak tahun 2017, pada mulanya kantor Balai Pengelolaan Transportasi darat Wilayah IV Riau-Kepri terletak di Jl. Lumba-Lumba kota Pekanbaru. Pegawainya berjumlah untuk ASN nya berjumlah 35 orang pegawai. Dan untuk pegawai PPNPN nya yaitu sekitar 66 orang. Di kantor ini ada beberapa unit atau perbidangnya, yaitu ada LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), TSDP (Transporasi Sungai Danau Dan Perintis), SAPRAS (Sarana Prasarana Transporsi Jalan), dan TU (Tata Usaha) Administrasi Perkantoran). Bentuk awal Kementrian perhubungan yang saat ini bernama Departemen perhubungan yang lahir dalam kancah perjuangan adalah gabungan antara Departemen perhubungan dan Kementrian perhubungan yang dipimpin oleh seseorang Mentri Abikusno yang tidak berlangsung lama, karna Departemen perhubungan dan Departemen pekerjaan umum tidak lagi memberikan tugas seperti yang sebelumnya. Departemen perhubungan dan Departemen pekerjaan umum kemudian dipimpin dengan pejabat yang berbeda yaitu Departemen perhubungan yang di pimpin oleh Abdul Karim dan Departemen pekerjaan umum di bawah pimpinan Ir. Putuhena. Sesuai dengan nama yang di sandangnya. Departemen perhubungan mengurus masalah perhubungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keinginan Belanda untuk menguasai kembali di Indonesia sangat jelas terlihat ketika mereka melancarkan agresi militernya yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948 dalam agresinya tersebut Belanda berhasil Yogyakarta dan menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta. Dalam kondisi darurat ini, Dinas telegrap sebagai salah satu jawatan dalam Departemen perhubungan berhasil menjalankan tugas nya yang sangat berampak penting bagi kelangsungan tegak nya Indonesia saat itu. Dinas telegrap berhasil mengirim berita terakhir ke Bukittinggi yang ditujukan kepada Mr. Syafrudin Prawiranegara dari Presiden Soekarno yang isinya memberikan wewenang untuk membentuk suatu pemerintah darurat. Selanjutnya dibentuklah sebuah kabinet darurat dengan Mr. Syafrudin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri dan Ir Indratjaja sebagai Menteri Perhubungan dan merangkap sebagai Menteri Kemakmuran. Sejak awal kemerdekaan hingga pengakuan kedaulatan Belanda atas RIS tahun 1949, Departemen perhubungan memiliki wewenang untuk mengatur perhubungan laut, udara, darat, perkeretarian serta pos, telegraf dan telekomunikasi dan masing-masing sector tersebut di urus oleh jabatan-jabatannya sendiri yang berada di bawah struktur organisasi Departemen perhubungan.

Titik berat yang menjadi perhatian Departemen Perhubungan pada era 1945-1949 adalah perhubungan darat karena diantara beberapa sector perhubungan lainnya seperti laut maupun udara belum bias menjadi sarana optimal. Angkatan laut masih terbatas jalur operasinya karena sebagian besar wilayah lautan Indonesia dikuasai oleh tentara sekutu, termasuk Belanda sehingga hubungan intern sulerada dalam kekuasaan mereka. Perkeretaapian menjadi perhatian utama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam mengelola perhubungan darat pada masa itu karena jaringan angkutan darat lainnya seperti bus, truk, mobil dapat dikatakan tidak ada karena semua alat angkut bermotor masih dikuasai Jepang. Pembinaan perkeretaapian sebagai sarana darat utama saat itu bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan sebab tingkat kerusakan keretaapi cukup signifikan. Pada masa Demokrasi Liberal ini terjadi perubahan bagi Departemen Perhubungan secara kelembagaan, yaitu dibentuknya Departemen Perhubungan Laut pada masa Kabinet Djuanda. Dengan adanya departemen tersebut, maka urusan laut yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Departemen Perhubungan, kini menjadi terpisah dan ditangani secara mandiri oleh Departemen Perhubungan Laut. Dalam rangka menguasai pelayaran secara menyeluruh, diputuskan bahwa sudah tiba waktunya bagi pemerintah untuk mendirikan perusahaan pelayaran. Oleh karena itu pada tahun 1952, Ir. Djuanda selaku Menteri Perhubungan menetapkan berdirinya PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) yang mulai beroperasi dengan 16 buah kapal milik Perpuska dan 45 kapal yang baru dibeli.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 153 tanggal 10 Juli 1959, Soekarno kemudian membentuk kabinet baru yang dikenal dengan sebutan Kabinet Kerja I. Dalam Kabinet Kerja I ini terjadi perubahan dalam struktur pemerintahan negara. Istilah Departemen Perhubungan tidak lagi digunakan dan sebagai gantinya dikenal dengan sebutan Kementrian Distribusi dengan J. Leimena menjabat sebagai Menterinya. Perubahan yang cukup signifikan bagi Departemen Perhubungan terjadi pada masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin ini. Pada era ini, urusan perhubungan laut, udara, dan darat serta komunikasi tidak lagi berada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara keseluruhan di bawah wewenang Departemen Perhubungan, tetapi terpecah-pecah kedalam beberapa Departemen yang baru terbentuk pada era tersebut. Nama Departemen Perhubungan dalam Kabinet Kerja I tidak lagi ada tetapi diganti dengan istilah Bidang Distribusi yang menangani perhubungan laut, perhubungan darat, pos, dan telekomunikasi, perhubungan udara serta perdagangan. Sedangkan pada Kabinet Kerja II, urusan perhubungan berada di bawah bidang Distribusi yang terdiri dari Departemen Perhubungan Darat, Pos dan Telekomunikasi, Departemen Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan Udara, dan Departemen Perdagangan. Dalam Kabinet Kerja IV, istilah Bidang Distribusi diganti dengan Kompartemen Distribusi yang antara lain terdiri dari Departemen Perhubungan Darat, Pos dan Telekomunikasi, Departemen Perhubungan Laut dan Departemen Perhubungan Udara.

Sedangkan pada masa Kabinet Dwikora, perhubungan laut tidak lagi masuk dalam Kompartemen Distribusi tetapi dibentuk kompartemen sendiri yaitu Kompartemen Maritim yang meliputi Departemen Perhubungan Laut, Departemen Perikanan dan Pengolahan Produksi Hasil Laut, serta Departemen Industri Maritim. Perubahan terjadi lagi dalam Kabinet Dwikora yang Disempurnakan I, yaitu terpisahnya urusan pos dan telekomunikasi dengan perhubungan darat. Dalam cabinet ini dibentuk Departemen baru yaitu Departemen Pos dan Telekomunikasi dibawah Kompartemen Distribusi. Selanjutnya dalam susunan Kabinet Dwikora yang disempurnakan II kembali terjadi lagi perubahan. Urusan-urusan perhubungan yang sebelumnya di distribusikan dalam beberapa departemen, kini disatukan kembali dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Departemen Perhubungan. Dalam masa awal Orde Baru Struktur Organisasi Departemen Perhubungan dalam Kabinet Pembangunan I, II, dan III adalah meliputi Menteri Perhubungan, Sekertaris Jenderal Departemen Perhubungan, Inspektorat Jenderal Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktorat Pariwisata Pos dan Telekomunikasi. Lembaga Metereologi dan Geofisika berada di bawah Direktorat Perhubungan Udara sampai dengan tahun 1972 karena pada tahun 1973 dipindahkan dari Direktorat Perhubungan Udara ke departemen Perhubungan. Penataan demi penataan yang dilakukan dalam Departemen Perhubungan dengan menyesuaikan struktur dan citranya, sehingga menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Konsolidasi yang dilakukan sejak tahun 1945 hingga sekarang menghasilkan sebuah Departemen yang besar.

Balai Pengelola Transportasi Darat yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut BPTD merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. BPTD dipimpin oleh Kepala, dan BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Tipe A. Susunan Organisasi BPTD Wilayah IV Riau-Kepri terdiri atas :

1. Subbagian Tata Usaha;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Seksi Transportasi sungai dan danau.
5. Penyeberangan Komersial dan Perintis; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

4.2 Visi dan Misi Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IV Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau

4.2.1 Visi

Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IV Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, yaitu:

“Menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat melalui suatu layanan transportasi darat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berkeadilan, yang aman, selamat, mudah dijangkau, berkualitas, berdaya saing tinggi, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dan dapat dipertanggungjawabkan.”

4.2.2 Misi

Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IV Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau juga mengacu pada Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, yaitu:

1. Menciptakan sistem pelayanan transportasi yang aman, selamat, dan mampu menjangkau masyarakat dan wilayah Indonesia.
2. Menciptakan dan mengorganisasi transportasi jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta perkotaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mendorong perkembangan industri transportasi darat yang transparan dan akuntabel.
4. Membangun prasarana dan sarana transportasi darat.

4.3. Tujuan dan Sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IV

4.3.1 Tujuan dari Kementerian Perhubungan

Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategis pembangunan. Tujuan diturunkannya operasional dari masing-masing misi pembangunan Kementerian Perhubungan dengan memperhatikan visi.

Tujuan dari pembangunan Kementerian Perhubungan sebagai berikut ;

1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi
2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi
3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi
4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan
5. Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran, dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi

4.3.2 Sasaran

Kementrian Perhubungan Darat yaitu merupakan representasi terukur dari tujuan yang hendak di capai untuk beberapa tahun kedepan, berikut ini sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Darat adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Meningkatkan kinerja pelayanan perhubungan
2. Meningkatkan kinerja pelayanan Transportasi Darat
3. Meningkatkan konektivitas Transportasi Nasional
4. Meningkatkan keselamatan Transportasi
5. Meningkatkan fasilitas dan layanan Transportasi Darat

4.4 Tipologi Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IV Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau

BPTD yang melaksanakan pengelolaan Transportasi Darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyebrangan komersial dan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Tipe A . Balai Pengelolaan Transportasi Darat yang dalam peraturan menteri ini disebut BPTD merupakan Unit pelaksana Teknisi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Direktur Jendral Perhubungan Darat .

4.5 Tugas Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IV Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau

Melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan , sungai,danau dan penyebrangan serta penyebrangan pelabuhan pada penyebrangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

Adapun penjabaran tugas di BPTD Wilayah IV Riau dan Provinsi Riau menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2017 yaitu ;

A. Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat Tipe A

Kepala Balai yang di pimpin oleh bapak ARDONO ,ATD,MT bertugas :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Menyusun rencana, program, dan anggaran Balai Pengelolaan Transportasi Darat, melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan.
- b. Melaksanakan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, dan memeriksa fisik rancangan pembangunan sarana angkutan jalan.
- c. Melaksanakan pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional.
- d. Mengelola urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat.
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan
- f. Melaksanakan penjaminan keamanan dan ketertiban, menyediakan dan mengusulkan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyebrangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- g. Melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyebrangan komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan.

B. Subbagian Tata Usaha

Kepala Subbagian Tata Usaha yang dipimpin oleh bapak DIDI K.

SUKMA, S.Sos, M, Si bertugas ;

- a. Menyusun bahan rencana, program, dan anggaran
- b. Menyusun bahan pengelolaan urusan tata usaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- c. Menyusun bahan pengelolaan rumah tangga
- d. Menyusun bahan pengelolaan urusan kepegawaian
- e. Menyusun bahan pengelolaan urusan keuangan
- f. Menyusun bahan evaluasi dan laporan
- g. Me;aksanakan tugas kedinanasan yang diberikan oleh pimpinan

C. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan yang dipimpin oleh bapak IHWAN PRIHANTO, S.SiT, MMTr bertugas ;

- a. Menyusun bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggraan, dan pengawasan terminal penumpang tipe A
- b. Menyusun bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal barang
- c. Menyusun dan mengawas unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor (UPPKB)
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor,
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemeriksaan fisik ranca bangun sarana angkutan jalan,
- f. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan pimpinan

D. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dipimpin oleh bapak ERFIMON, S.SIT,MM bertugas :

- a. Menyusun bahan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan nasional



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Menyusun bahan pengawasan angkutan orang lintas batas negara dan/atau antar kota dan provinsi
- c. Menyusun bahan pengawasan angkutan orang tidak dalam trayek, dan angkutan barang
- d. Menyusun bahan peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan yang ditugaskan pimpinan

E. Seksi Transportasi Sungai Danau dan Penyebrangan Komersial dan Perintis

Kepala Seksi Transportasi Sungai Danau dan Penyebrangan Komersial dan Perintis yang dipimpin oleh RISKAN, AMd LLAJ,SE bertugas ;

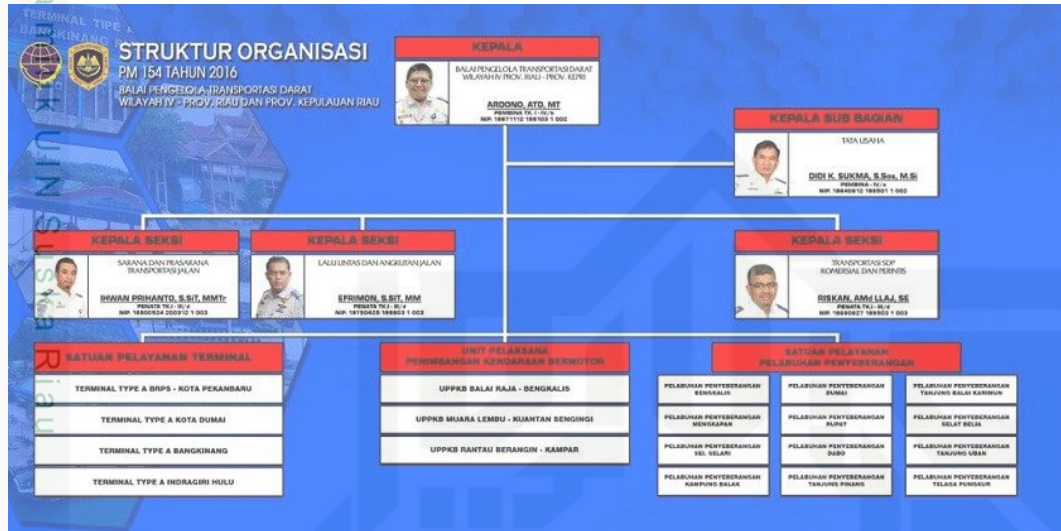
- a. Menyusun bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan penyebrangan
- b. Menyusun bahan peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyebrangan
- c. Menyusun bahan penyelenggaraan pelabuhan penyebrangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial
- d. Menyusun bahan pelayanan jasa pelabuhan sungai, danau, penyebrangan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan yang ditugaskan pimpinan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

4.6 Struktur Organisasi BPTD Tipe A Serta Posko- Posko PSBB

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



Sebagai upaya untuk melaksanakan Pencegahan Penyebaran COVID-19, bersama ini dapat kami laporkan bahwa BPTD Wilayah IV Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau telah membentuk Posko Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Kantor Induk BPTD -IV dan di setiap Satuan Pelayanan di wilayah kerja kami untuk mendukung kegiatan Tanggap Darurat Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Selain membentuk Posko Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Kantor Induk BPTD dan pada setiap Satuan Pelayanan, BPTD Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepulauan Riau turut membuka Posko Pengawasan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlokasi di beberapa Jalan Nasional dan Jalan Provinsi di beberapa titik perbatasan wilayah yang berfungsi sebagai Pos Pemantauan Pencegahan Penyebaran COVID-19 dan Pos Pengawasan PSBB guna mendukung Kota Pekanbaru dalam melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.2
Posko PSBB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dalam bab ini peneliti akan menarik kesimpulan dan memberikan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi instansi terkait pelaksanaan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Riau-Kepri tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di Masa Pandemi Covid-19 .

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Riau-Kepri tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di Masa Pandemi Covid-19 sudah berjalan dengan baik hanya saja belum sepenuhnya dapat dikatakan maksimal.

Hal ini dapat dilihat dari indikator penelitian yang meneliti empat indikator. **Pertama**, perencanaan kegiatan ini telah sesuai dari turunnya peraturan kebijakan oleh pemerintah dan Kemenhub PSBB ini bisa menjadi perencanaan Jangka panjang ketika kita tidak mematuhi dan melaksanakan nya dengan sebaik mungkin. Dan perencanaan jangka pendek adalah apa saja yang kita butuhkan dilapangan karna dalam kurun waktu yang singkat. **Kedua**, Pengorganisasian dapat dilihat system yang digunakan dan pengaturan tugas teknis dilapangan **Ketiga**, Pelaksanaan sudah terkoordinasi dengan baik serta ada sanksi yang diterapkan jikalau kegiatan pelaksanaan ini ada yang tidak mematuhi . **Keempat**,

Pengawasan disini yaitu evaluasi dan pemantauan yang dilakukan dalam pelaksanaan PSBB ini yaitu dengan menilai hasil laporan dilapangan.

Adapun faktor penghambat pelaksanaan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Riau-Kepri tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di Masa Pandemi Covid-19 ,diantaranya yaitu kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar petugass saat dilapangan dan kurangnya kepathan masyarakat akan kebijakan dari PSBB ini. Masih banyak teguran yang ditemukan dilapangan seperti tidak memakai masker dan putar arah balik.

6.2 Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah diperlukan upaya lebih Membuat aturan terkait pelaksanaan protokol kesehatan disertai dengan sanksi tegas pada bidang transportasi dimasa pandemi Covid-19 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Melakukan sosialisasi dan edukasi secara luas baik secara elektronik maupun non elektronik kepada masyarakat terkait pentingnya protokol kesehatan dimasa pandemi Covid-19
2. Bagi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Riau-Kepri diharapkan lebih Melakukan evaluasi secara berkala pelaksanaan protokol kesehatan di bidang transportasi guna perbaikan aturan serta penetapan kebijakan yang tepat dan sigap serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara seluruh *stakeholder* di bidang transportasi guna penegakan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

SE Satgas Nomor 4 Tahun 2020

PM 25 Tahun 2020

PP 21 Tahun 2020

Permenhub Nomor 56 Tahun 2017

Buku:

Afifuddin, Saebani. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit CV. Pustaka setia

Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif ancangan Metodologi, presentasi, dan Publikasi Hasil penelitian untuk mahasiswa dan peneliti Pemula Bidaang Ilmu – Ilmu Sosial, pendidikan dan Humaniora*. Bandung: CV. Pustaka Setia

Handayaniingrat, Soewarno. 1981. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV Haji Masagung

Hasibuan, Malayu. 2001. *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Sedarmayanti. 2012. *Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik Bagian Pertama Edisi Revisi*. Bandung: CV Mandar Maju

Soekanto, Soejono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sumardi, Nyoman. 2010. *Sosiologi Pemerintahan Dari perspektif Pelayanan, pemberdayaan, Interaksi, dan sistem kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia

Semiawan. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Skripsi/Jurnal:

- Sitanala dan Adonia. (2007). Analisis Pelaporan Keuangan sektor Publik Dan Kinerja, Transparansi Serta Akuntabilitas Publik. *Jurnal Unpatti* , vol.5 nomor 2.
- Sirojuzilan. (2008). Disparitas Ekonomi Wilayah Barat Dan Wilayah Timur Provinsi Sumatera Utara Dan Kaitannya Dengan Perencanaan Wilayah. *Jurnal Administrasi Publik* , vol.9 nomor 21.
- Herdiana, Dian. (2019). Implementasi Kebijakan: Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sebagai Upaya Penganggulan Covid-19. *Jurnal Corona Virus Disease* , vol.1.
- Hanum, F., & Amildha Yanuarita, H. (2020). Publik Manajemen dasar. *Jurnal Manajemen*, vol.3 nomor 2.
- Nasimul Firdaus, Ilham.(2020). Media Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdampak Sosial dan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi*, vol.3 nomor 2.
- Putri Robiatul, Dwi. (2020).Kebijakan PSBB Pemerintah Kota Surabaya dalam Mencegah Virus Covid-19. *Jurnal Administrasi Publik*, vol 6 nomor 2.
- Sutri Asih, Efi. (2015). Analisis Pengelolaan Pelayanan Air Bersih Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kampar Kabupaten Kampar. *Skripsi Ilmiah*
- Palupesih, Vikram. (2021). Efektivitas Penerapan Sanksi Selama Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pada Penanggulangan COVID-19. *Jurnal Hukum*, vol.1
- Jaluseta Anugerah, Royan. (2020). Efektifitas Penerapan Strategi Online Marketing Oleh UMKM Dalam Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Corona Viruses Disease 2019 (Covid-19) . *Jurnal Manajemen dan Inovasi*, vol.3 nomor 2
- Gesi, Burhanuddin. (2012).Jurnal Manajemen Publik, Teori Henry Fayol . *Jurnal Manajemen* , vol.1 nomor 2
- Setiawan, Agus & Edi Kurniawan. (2021). Passenger Transportation Sea Transportation Services In Pandemy. *Jurnal Jalasena*, vol.2 nomor 2.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Internet:

(APJII), A. P. (2020, November 9). *Siaran Pers: PSBB dimata masyarakat 2020-Q2*. Retrieved Januari 20, 2021, from buletin.apjii: [https://blog.apjii.or.id/index.php/2020/11/09/PSBB banyak-di-2019-q2-2020/](https://blog.apjii.or.id/index.php/2020/11/09/PSBB%20dimata%20masyarakat%20banyak-di-2019-q2-2020/)

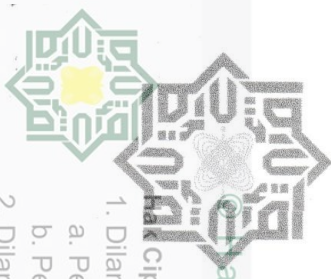
Al-Qur'an dan Hadist :

Surat Al- Baqarah ayat 286

Surat Al- Baqarah ayat 208

Surat Ash-Shaff ayat 2-3





KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/4963/2021 Pekanbaru, 21 September 2021
M :
Sifat : Biasa 13 Safar 1443 H
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. **Dr. Mustiqowati Ummul F. M. Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Karina Kadir
NIM : 11770523409
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : IX (Sembilan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Fungsi Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Riau-Kepri Tentang Pos Pengamanan Jalan Transportasi di Masa Pandemi Covid-19**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas. Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

Dilindungi Undang-Undang

UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2165/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pra Riset

Pekanbaru, 29 Maret 2021 M
15 Sya'ban 1442 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

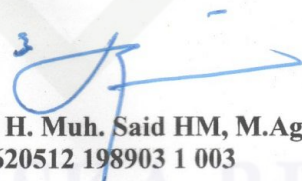
Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Karina Kadir
NIM. : 11770523409
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan **Pra Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Analisis Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Pada Kantor Balai Pengelola
Transportasi Darat Wilayah IV Riau-kepri"** Untuk itu kami mohon kiranya
Saudara berkenan **memberikan bantuan yang diperlukan** kepada mahasiswa
tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,


Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2483/2021
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 19 April 2021 M
 7 Ramadhan 1442 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Karina Kadir
 NIM : 11770523409
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Analisis Fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Iv Riau-kepri
 Tentang Pos Pengamananjalan Transportasi Di Masa Pandemi Covid-19"**
 Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang
 diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/40980
T E N T A N G

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Pemohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VI/PP.00.9/2483/2021 Tanggal 19 April 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

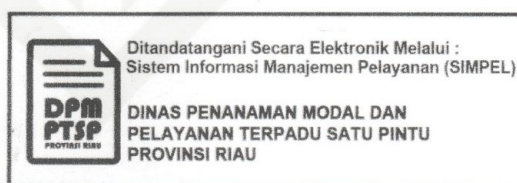
1. Nama : **KARINA KADIR**
2. NIM / KTP : **11770523409**
3. Program Studi : **ILMU ADMINISTRASI NEGARA (S1)**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **" ANALISIS FUNGSI BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYH IV RIAU-KEPRI TENTANG POS PENGAMANAN JALAN TRANSPORTASI DI MASA PANDEMI COVID-19**
7. Lokasi Penelitian : **KANTOR BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IV RIAU-KEPRI**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 April 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Riau-Kepri
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH IV – PROVINSI RIAU DAN PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

JL. CEMARA NO. 57, SUKAMAJU,
KEC. SAIL, PEKANBARU, 28132

TELP : (0761) 8406092
EMAIL : bptdriaukepri@gmail.com

FAX : (0761)

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : KP. 004/ XI /14 /BPTD-IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIDI KIRANAWAN SUKMA, S.Sos.M.Si

Jabatan : KASUBBAG TATA USAHA

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Karina Kadir

NIM : 11770523409

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Fekonso – Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Benar telah mengadakan penelitian di Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau dengan Judul : Analisis Fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Masa Pandemi Covid-19.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : PEKANBARU
Pada Tanggal : 14 September 2021



KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

DIDI KIRANAWAN SUKMA, S.Sos. M.Si
NIP. 19640812 198501 1 002

hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau



BIOGRAFI PENULIS

KARINA KADIR, dilahirkan di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat pada 21 Juli 1999 yang merupakan anak ketiga dari tiga orang bersaudara dari pasangan Bapak Abdul Kadir dan Ibu Nur Efila Effendi. Penulis telah melalui jenjang pendidikan dasar di SDN 08 Kubang Duo Koto Panjang di Agam, Kota Bukittinggi.

Setelah menamatkan studi di SDN 08 tahun 2011, lalu melanjutkan Pendidikan di MTS S Muhammadiyah Kota Bukittinggi dari tahun 2011-2014 yang terletak di Kota Bukittinggi. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 5 Kota Bukittinggi dan menamatkan studi pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 tersebut penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil Jurusan Ilmu Administrasi Negara melalui jalur Mandiri pada Fakultas Ekonomi & Ilmu Sosial.

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan dan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Dengan Rahmat dan Ridho Allah SWT pada 2021 penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi dengan judul **“Analisis Fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Riau-Kepri di Wilayah Pekanbaru dalam Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Masa Pandemi Covid-19.”** di bawah bimbingan Ibuk Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M.Si.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.